



Available online at **FACTUM**; Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah  
website: <https://ejournal.upi.edu/index.php/Factum>  
**FACTUM**: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah, 14(1), 133-146



RESEARCH ARTICLE

---

---

## R. A. A. Wiranatakusumah V; Tokoh Republikan sebagai Wali Negara Pasundan (1948 – 1950)

Rega Resdiyawan, Agus Mulyana, Wildan Insan Fauzi

Program Studi Pendidikan Sejarah, FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia  
Corresponding Author: [firdautami@upi.edu](mailto:firdautami@upi.edu)

---

---

**To cite this article:** Resdiyawan, R., Mulyana, A., & Fauzi, W.I. (2025). R.A.A. Wiranatakusumah V; Tokoh Republikan sebagai wali negara pasundan (1948 – 1950). *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 14(1), 133-146. <https://doi.org/10.17509/factum.v14i1.45581>.

---

---

### Abstract

This study aims to analyze the political role of R.A.A Wiranatakusumah V in 1948-1950 which includes his work when he was Republican, became Mayor of Pasundan. The method in this research is the historical method which consists of several stages, namely: heuristics, source criticism (external and internal), interpretation and historiography. Through this research, it can be known, Revolution, there were two opposing groups. Second, role of R. A. A. Wiranatakusumah V work as the Mayor of Pasundan is very central as a liaison between the Republic of Indonesia and the Pasundan State. Although in the Pasundan State there are many factions and groups, R.A.A. Wiranatakusumah V is a Republican who holds fast to the independence and struggle of the Republic of Indonesia. And the end of R. A. A. Wiranatakusumah V political activities was marked by the end of his position as Mayor of Pasundan which was marked by the end of the Pasundan State in 1950 rejoining the of Indonesia.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran politik RAA Wiranatakusumah V pada tahun 1948-1950 yang meliputi kiprahnya ketika menjadi Walikota Pasundan. Metode dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: heuristik, kritik sumber (eksternal dan internal), interpretasi dan historiografi. Melalui penelitian ini dapat diketahui, pada masa Revolusi Indonesia munculnya dua golongan, yaitu Republikan dan Federalis. Kedua golongan tersebut memiliki kepentingan yang saling berlawanan dan menghambat paham nasionalisme di Indonesia. Selain itu penelitian ini bagaimana kiprah R. A. A. Wiranatakusumah V yang memiliki paham *republikan* menjabat sebagai Wali Negara Pasundan dan memiliki peranan yang sangat sentral sebagai penghubung antara Republik Indonesia dengan Negara Pasundan. Meskipun di Negara Pasundan terdapat banyak golongan dan golongan, R.A.A. Wiranatakusumah V adalah seorang Republikan yang memegang teguh kemerdekaan dan perjuangan Republik. Dan berakhirnya posisinya sebagai Walinegara Pasundan yang ditandai dengan berakhirnya Negara Pasundan pada tahun 1950 bergabung kembali dengan Republik Indonesia Serikat.

### Article Info

Article History:  
Received 24 April 2022  
Revised 1 April 2025  
Accepted 25 April 2025  
Available online 25 April 2025  
1

### Keyword:

R. A. A. Wiranatakusumah V;  
Republikan; Federalis; Pasundan  
State.

### Kata Kunci:

R. A. A. Wiranatakusumah V;  
Republikan; Federalis; Negara  
Pasundan.

## PENDAHULUAN

R.A.A Wiranatakusumah V adalah seorang Bupati Cianjur yang diangkat oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada 1912. Cianjur merupakan salah satu *afdeeling* di wilayah Priangan yang dibagi sesuai dengan peraturan reorganisasi Priangan 1 Januari 1871. Tidak lama menjabat, R.A.A Wiranatakusumah V menggantikan Bupati Bandung yaitu R.A.A Martanegara pada 1920. Selain jabatan dalam pemerintahan, R.A.A Wiranatakusumah V juga ikut serta dalam *Volksraad* (Dewan Rakyat) pada 1931, sekaligus kembali menjadi Bupati Bandung pada 1935-1945 (Lubis, 1998 hlm. 3). Karir R.A.A Wiranatakusumah pada 1912-1920 menjadi Bupati Cianjur dapat beradaptasi dengan lingkungan sosial budaya menak Cianjur (Wiradiredja, 2012, hlm. 289). Ketika kepemimpinannya di Bandung, Wiranatakusumah V juga berjasa dalam dukungannya saat pembangunan kota dan kabupaten Bandung (Kunto, 1984, hlm. 205). Sebagai menak yang juga mendapat pendidikan, R.A.A Wiranatakusumah membentuk pemikirannya sehingga berpaham republikan melalui akses pendidikan yang semakin terbuka setelah berlakunya politik etis.

Politik etis memberikan pengaruh pada terbukanya akses pendidikan, yaitu dengan munculnya sekolah-sekolah (Sofiani, 2018, hlm. 9). Hal tersebut melahirkan tokoh-tokoh nasional yang mengagas kemerdekaan Indonesia. Mayoritas tokoh-tokoh tersebut muncul dari kalangan menak atau bangsawan, yang telah memperoleh pendidikan secara intelektual sehingga dirinya mampu berpikir akan kemajuan bangsa. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, masa-masa sulit justru kembali menghadang laju kemerdekaan Indonesia. Dalam membangun konstitusi negara, bangsa Indonesia mengalami hambatan. Hal tersebut berasal dari adanya tentangan dari pemimpin bangsa. Oleh karenanya, perdebatan *the founding father* berargumentasi pada bagaimana menetapkan dan menjaga sebuah wilayah kedaulatan Republik Indonesia, yang

merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta mengenai batas-batas wilayah (Zuhdi, 2014, hlm. 42).

Pasca proklamasi terjadi proses revolusi di berbagai wilayah di Indonesia. Proses perubahan yang sangat cepat yang dilakukan oleh sebuah negara yang pada semula di bawah kekuasaan Belanda, berubah menjadi sebuah negara yang merdeka. Peristiwa revolusi merupakan fase yang menuntun rakyat Indonesia bergerak bersama menata kehidupan bangsa ke arah yang lebih baik, yakni dengan menghapuskan kolonialisme untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa. (Limah, Utomo, & Suryadi, 2018, hlm. 39). Dalam mewujudkan kemerdekaan yang utuh di wilayah Indonesia mendapat tantangan dari berbagai aspek. Salah satu aspek pokok dalam perjuangan Indonesia pada masa revolusi adalah menanamkan pemahaman konsep Nasionalisme di Indonesia setelah merdeka. Pemahaman nasionalisme di Indonesia lahir dari keragaman sosio-kultural, dan proses evolusi makna pada bahasa-bahasa yang digunakan. Dalam sejarahnya, konsep nasionalisme digunakan untuk membentuk konstitusi negara yang berdiri atas dasar sesuatu yang dirasakan, dialami dan dilakukan bersama (Aman, 2008, hlm. 7).

Lahirnya paham nasionalis di Indonesia tidak terlepas dari kemunculan pergerakan-pergerakan melawan kolonialisme. Gerakan anti kolonial tersebut mendorong terjadinya proklamasi dan pembentukan negara Indonesia. Proklamator Indonesia mengagas untuk mempersatukan nusantara menjadi sebuah kesatuan yang terdiri dari elemen nasionalis, islamis, dan marxis. Namun, pada masa revolusi pemimpin bangsa dan daerah memiliki pertentangan mengenai arah negara. Meskipun Indonesia telah diproklamasikan, keadaan pada saat itu berujung pada pemilihan untuk mengikuti Belanda yang muncul setelah proklamasi, atau bergabung kepada Republik Indonesia. Di masa revolusi Indonesia, Soekarno juga mengemukakan bahwa kondisi era 1945 – 1967 diwarnai dengan revolusi sosial, revolusi politik dan revolusi ekonomi (Jamil

dkk, 2017, hlm. 19). Hal tersebut menunjukkan bahwa pada pembentukkan negara Indonesia terdapat perbedaan secara sosial dan kultural dalam masyarakat yang memungkinkan untuk terjadi pertentangan. Kepemimpinan Republik Indonesia mengalami pertentangan dari faktor daerah maupun luar. Adanya perbedaan pendapat arah dan bentuk negara, serta serangan Belanda menyulitkan pembentukan keutuhan negara Indonesia pasca proklamasi.

Terjadinya revolusi di Indonesia mengakibatkan dinamika politis ditandai dengan kemunculan golongan republikan dan kontrarevolusi (Kahin, 2013, hlm. 56). Wiranatakusumah V termasuk dalam pemimpin yang memiliki sebuah pandangan republikan. Pemimpin republikan merupakan pemimpin yang sangat dekat dengan rakyatnya. Tak mengenal akan adanya sistem monarki yang melahirkan pemimpin berdasarkan keturunan, tetapi pemimpin itu adalah yang dipilih oleh rakyatnya. Bagi mereka kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyatnya. Selain itu, ia lebih condong mendukung negara kesatuan dengan tidak melihat budaya dan etnis tertentu dibandingkan dengan kaum kontra revolusi yang lebih memilih setuju dengan apa yang dilakukan oleh kolonialisme Belanda di Indonesia (Reid, 1996, hlm. 23). Selain itu, cukup menarik bahwa pemimpin atau elit politik pada saat itu yang mayoritas kalangan menak memiliki pemahaman berbeda hingga terpecah menjadi golongan berpaham republikan berpaham kontra revolusi.

Dinamika masa revolusi memang sangat besar, hal ini ditunjukkan dengan dua corak perlawanan pada masa revolusi, yakni perlawanan diplomatis dan juga militer. Keduanya saling keterhubungan antar satu dengan yang lain, di mana situasi dan kondisi di lapangan akan berdampak pada perlawanan diplomatis sebagaimana banyak dilakukannya perjanjian-perjanjian antara Indonesia dengan pihak kolonial Belanda pada masa revolusi, perjanjian tersebut, antara lain seperti perjanjian Linggarjati, Renville, Roem Royen dan Konferensi Meja Bundar (Kahin, 2013,

hlm. 151). Salah satunya dalam perjanjian Renville, menurut Sjamsuddin, et al (1992, hlm. 28) sebagai konsekuensi dari persetujuan perjanjian Renville bulan Januari 1948, maka salah satu dampaknya adalah lahirnya negara-negara bagian, salah satunya adalah Negara Pasundan. Pemimpin awalnya adalah Suria Kartalegawa, kemudian dilakukan pemilihan ulang dan menjadikan Wiranatakusumah V sebagai pemimpin. Wiranatakusumah V bukan kandidat yang diunggulkan dalam pemilihan calon wali negara, karena dirinya saat itu sedang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, hal ini membuat cukup mengejutkan pihak Belanda karena diluar ekspektasi mereka atas terpilihnya wali negara pada Konferensi Jawa Barat tersebut. Setelah terpilih pun, sikap Wiranatakusumah V masih saja memegang prinsip republikannya dan tidak setuju akan adanya Negara Pasundan, Wiranatakusumah V meyakini tindakannya ini adalah sebagai pengalaman dari prinsip republikannya dan tidak mengkhianati Republik (Mulyana, 1996).

Peranan Wiranatakusumah V tidak dapat dilepaskan dari pengaruh situasi politik pasca proklamasi. Pembentukan arah negara yang digagas oleh *founding father* serta tantangannya mempengaruhi pemikiran Wiranatakusumah untuk berpegang pada paham republikan. Kajian ini berfokus pada peranan Wiranatakusumah V sebagai republikan dalam mempertahankan Negara Pasundan di masa pasca proklamasi. Sebagai tokoh Sunda, Ajip Rosidi (Rosidi, 2009) menyebutkan bahwa R.A.A Wiranatakusumah V memiliki peran fundamental dalam membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun tokoh sunda lain seperti Suria Kartalegawa, R Adjoe, Iwa Kusumasoemantri juga memiliki peranan dalam pembentukan negara pasca proklamasi, R.A.A Wiranatakusumah V memiliki posisi penting sebagai Menteri Dalam Negeri sekaligus Wali Negara Pasundan, terutama pada kontribusinya dalam mengembalikan Negara Pasundan ke dalam Republik Indonesia. Kajian artikel ini berupaya melihat kiprah

politik Wiranata Kusumah V dari Menteri Dalam Negeri hingga Wali Negara Pasundan pada 1945 sampai 1950.

## **METODE**

Metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah metode historis. Metode historis lazim juga disebut dengan metode sejarah. Menurut Abdurrahman (2007, hlm. 53) "Metode sejarah merupakan suatu prosedur, proses, atau teknik yang sistematis dalam penyelidikan suatu disiplin ilmu tertentu untuk mendapatkan objek yang diteliti, metode penelitian sejarah berarti "bagaimana mengetahui sejarah". Adapun langkah-langkah pada metodologi penulisan menurut Ismaun (2005, hlm. 48-50) yang terdiri dari heuristik, kritik, intepretasi, dan historiografi.

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengumpulkan berbagai sumber dalam bentuk studi literatur baik buku, artikel jurnal, tesis, skripsi, disertasi, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan sumber kajian. Setelah sumber sejarah sudah terkumpul, tahap berikutnya ialah kritik sumber atau verifikasi untuk memperoleh keabsahan sumber. Kritik sumber merupakan proses menyeleksi sumber yang telah dikumpulkan, yang bertujuan untuk memperoleh data atau sumber yang valid. Kritik sumber dilakukan dengan memperhatikan aspek internal maupun eksternal dari pada suatu sumber yang didapat oleh penulis (Sjamsuddin, 2012, hlm. 135). Dalam hal ini, dilakukan uji keabsahan tentang keaslian sumber (autentisitas) yang dilakukan melalui kritik eksternal dan keabsahan tentang kesahihan sumber (kredibilitas) yang ditelusuri melalui kritik ekstern" (Abdurrahman, 2007, hlm. 68). Kritik sumber eksternal maupun internal dilakukan agar penulis dapat memilih sumber yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Selain perlu melakukan kritik terhadap sumber tertulis, penulis juga perlu melakukan kritik terhadap sumber sejarah lisan. Pertimbangan dalam pemilihan narasumber terhadap topik

permasalahan yang akan dikaji dan kualitas informasi yang disampaikan. Penulis harus mempertimbangkan keadaan dari narasumber, usia narasumber, juga peran narasumber. Sehingga benar-benar mendapatkan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Interpretasi merupakan tahap selanjutnya setelah melalui tahap heuristik serta kritik sumber baik eksternal maupun internal dalam penelitian sejarah. Dalam interpretasi sejarah ada dua metode yang digunakan yaitu, analisis dan sintesis. Keduanya dipandang sebagai metode utama di dalam interpretasi karena analisis berarti menguraikan, sedangkan sintesis berarti menyatukan. Menurut Berkhofer (dalam Abdurrahman, 2007, hlm.73), analisis sejarah itu sendiri bertujuan melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan suatu interpretasi menyeluruh. Interpretasi ini dilakukan peneliti untuk menafsirkan sumber-sumber yang telah didapat. Pada tahap ini peneliti memahami dan mencari hubungan antara fakta-fakta sejarah yang didapat, data dengan konsep dan teori yang relevan. Penafsiran ini dilakukan dengan menghubungkan data dan fakta-fakta sejarah tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh. Penafsiran ini dilakukan dengan pendekatan interdisipliner, yaitu ilmu sejarah sebagai ilmu utama dan kajian sosial ekonomi, peneliti menggunakan ilmu sosiologi, ilmu antropologi dan ilmu ekonomi.

Setelah melakukan heuristik dan kritik, langkah selanjutnya adalah historiografi. Dalam historiografi ini dilakukan penafsiran, penjelasan, dan penyajian. Historiografi menurut Ismaun (2005, hlm. 28) yaitu, usaha untuk mensintesis data-data dan fakta-fakta sejarah menjadi suatu kisah yang jelas atau suatu penulisan yang utuh, baik itu berupa karya besar ataupun hanya merupakan makalah kecil. Penulis melakukan penafsiran fakta-fakta, formulasi serta presentasi hasil yang menuntut untuk dilakukannya penulisan teks yang sesungguhnya, sehingga pada akhirnya menghasilkan sebuah karya historiografi (Sjamsuddin, 2012, hlm. 121). Penulisan karya

sejarah yang ditulis dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk penulisan deskriptif-naratif dan analisis-kritis dengan tidak melupakan aspek kausalitas sejarah.

## PEMBAHASAN

### **Kaum Republikan dan Kaum Federalis**

Istilah republikan di Indonesia muncul pada awal pembentukan negara. Hal tersebut menandakan siapa saja yang memiliki rasa nasionalisme yang mendukung keberadaan konsep negara republik. Pemahaman awam mengenai Republikanisme secara terbatas biasanya mengarah pada pembentukan pemerintahan non-monarki, yang dalam konteks perjuangan politik Indonesia sering mengacu pada antikolonialisme semata (Soedjatmoko, 1991, hlm. 3). Hampir mayoritas para tokoh di Indonesia telah menyepakati bahwa Indonesia lebih cocok dengan konsep republik, terutama ketika Belanda belum kembali untuk menduduki Indonesia yang telah merdeka.

Konsep republiklah yang nantinya menjadi hasil dari kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Ketika Belanda datang dan berusaha kembali merebut Indonesia pada bulan September 1945, menjadi sebuah tantangan besar bagi para tokoh nasionalis yang menyepakati negara Republik. Belanda datang dengan menumpang kepada tentara Sekutu (Inggris) yang bertugas membebaskan tawanan-tawanan perang Belanda dan mengembalikan tentara Jepang ke tanah air mereka. Belanda cukup rumit melihat daerah bekas jajahannya itu telah menyatakan diri sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat. Bentrokan antara Belanda dengan para tokoh nasionalis tidak dapat dihindarkan. Hal tersebut menjadi sebuah bukti bahwa usaha kemerdekaan tidak akan dikhianati begitu saja dan tetap dipertahankan. Belanda sangat memiliki ambisi yang cukup kuat untuk merebut kembali wilayah jajahannya. Salah satu caranya adalah memecah belah Indonesia dan mekanismenya ialah dengan memerintah tidak langsung (*indirect rule*) melalui negara-

negara federal (*federal states*) yang dibentuk (Sjamsuddin, et al. 1992 hlm. 23).

Belanda mengikat negara-negara itu dalam sebuah federasi (serikat) lalu membentuk Uni Indonesia-Belanda untuk tetap menjamin kepemimpinan Belanda seperti sebelum perang. Cara ini dengan sendirinya akan memojokkan Republik Indonesia. Permasalahan ini menjadi hal yang cukup berat bagi Indonesia yang baru saja mengatakan kemerdekaan (Cheong, 1982, hlm. 17). Kedatangan Belanda jelas sangat merubah konsep yang telah dirancang sebelumnya yaitu Negara Kesatuan Republik. Wiranatakusumah V bersama dengan tokoh republikan lainnya seperti Soekarno, Hatta dan Sjahrir sangat terpukul. Terlebih mereka harus memindahkan ibu kota ke Yogyakarta dan menetap sementara di sana. Disamping itu, terdapat para tokoh pribumi yang sepakat terhadap konsep yang ditawarkan oleh Belanda pada saat itu. Akan tetapi, beberapa tokoh pribumi juga mendukung bentuk negara serikat yang ditawarkan oleh Belanda. Para tokoh pribumi memandang konsep Negara Indonesia Serikat sebagai cara untuk tetap mengamankan kekuasaannya, tokoh yang mendukung pandangan tersebut disebut sebagai kaum federalis (Suwirta, 2015, hlm 41).

Salah satu contoh munculnya kaum federalis terjadi di Jawa Barat. Keputusan para tokoh nasionalis republik pada saat itu dirasa kurang menghargai keberadaan kaum Sunda. Dengan mengangkat orang Jawa sebagai gubernur di Jawa Barat. Hal tersebut menjadi sebuah celah konflik dalam tubuh Indonesia sendiri (Ekadjati, et al, 1980, hlm. 61). Hadirnya kembali Belanda dengan membawa konsep negara federal menjadi sebuah opsi pelarian bagi siapapun yang tidak sepakat dengan kaum republikan (Lapian & Drooglever, 1992, hlm. 59). Khususnya Suria Kartalegawa sebagai tokoh sunda yang lebih mendukung negara federal buatan Belanda akibat permasalahan yang ditimbulkan oleh kaum republikan yang mengangkat orang keturunan suku Jawa sebagai gubernur Jawa Barat (Iskandar, 2001, hlm. 13). Dalam kasus

Negara Pasundan, kita dapat menemui dua kelompok (Republikan dan Federalis) ketika terjadi pergolakan politik dalam penentuan tata negara di Jawa Barat. Seperti yang diketahui bahwa pada masa pemerintahan Hindia Belanda, daerah Jawa Barat sendiri merupakan sebuah provinsi. Kemudian pada masa pemerintahan Jepang, Jawa Barat dibagi ke dalam lima keresidenan yaitu Banten, Bogor, Jakarta, Priangan, dan Cirebon. Baru setelah kemerdekaan, dalam sidang PPKI 19 Agustus 1945 Jawa Barat dijadikan sebagai provinsi kembali dengan gubernurnya adalah Sutardjo Kartohadikusumo (Sjamsuddin, et al., 1992, hlm. 26).

Menurut Mulyana (1996, hlm 23) di Jawa Barat munculnya gerakan kontra revolusi yang dapat dijelaskan menggunakan teori Charles Tilly yang menyatakan, ketika perubahan sosial menggusur hak-hak tradisional, maka akan timbul sebuah gejolak. Suria Kartalegawa sebagai tokoh sunda tentunya memiliki hak untuk memimpin daerahnya sendiri. Pada 4 Mei 1947, Suria Kartalegawa yang memimpin Partai Rakyat Pasundan (PRP), memproklamkan lahirnya Negara Pasundan (Zuhdi, 1994, hlm 20). Ini menjadi bukti perjuangan Suria Kartalegawa yang menentang putusan kaum republikan yang telah menggusur hak-hak tradisionalnya. Dengan demikian, terlihat jelas bagaimana keterlibatan antara dua golongan besar pada masa revolusi yang kemudian mempengaruhi terhadap berbagai perubahan bentuk ketatanegaraan di Indonesia. Hal tersebut juga menjadi sebuah peluang bagi Belanda. Selain memecah-belah wilayah, Belanda pun melihat kesempatan memecah para tokoh besar. Pecahnya pergerakan antara Wiranatakusumah V dan Suria Kartalegawa menjadi sebuah contoh, terlebih mereka adalah tokoh besar di Sunda (Jawa Barat).

Lebih jauh, George McTurnan Kahin (dalam Sjamsuddin, 1992, hlm. 51) mengklasifikasi motivasi dari kaum federalis pada saat itu. Klasifikasi yang dibuat oleh Kahin, kemudian berhasil menggambarkan kelompok-kelompok federal berdasarkan motivasi dari berbagai

*dramatis personae* yang menduduki negara-negara federal, sebagai berikut: a) Kelompok aristokrat lokal yang mempunyai kekhawatiran akan bergesernya posisi mereka secara politik dan ekonomi dalam pemerintah RI; b) Kelompok oportunis politik yang tidak puas dengan kedudukan mereka dalam Pemerintahan RI; c) Kelompok profesional dan pegawai yang muncul di wilayah Sumatera Timur sebagai akibat dari adanya revolusi sosial; d) Kelompok Republikan yang berusaha mengimbangi kaum anti-republik dengan cara memasuki negara-negara atau daerah otonom milik Belanda; e) Kelompok federal yang muncul karena desakan kebutuhan ekonomi sehingga memutuskan untuk memberikan dukungan pasif kepada Belanda.

Terbentuknya negara-negara bagian di Indonesia yang dimulai dari tahun 1946 dan kemudian menjadi negara federasi RIS pada akhir tahun 1949, pada dasarnya tidak terlepas dari peranan H.J. van Mook yang memperkenalkan sistem politik federalnya di Indonesia (Rivai, 1984, hlm. 18). Keberadaan van Mook sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda sekaligus kepala NICA dapat dikatakan strategis karena dapat menjadi faktor pendukung dipertahankannya konsep negara federal dengan melibatkan kekuatan militer dan politik. Daerah-daerah yang dipecah menjadi negara-negara bagian merupakan wilayah yang dulunya adalah bagian dari Republik Indonesia saat dibacakan teks Proklamasi 17 Agustus 1945. Pembentukan negara federal yang berlangsung dari tahun 1946-1949 setidaknya berhasil melahirkan 15 negara bagian, yang kemudian diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar: 1) kelompok yang disebut negara (terdiri dari enam wilayah, yang diantaranya terdapat Negara Pasundan) dan 2) kelompok yang disebut sebagai daerah istimewa (berjumlah sembilan wilayah). Untuk melihat keterlibatan kaum Republikan dan Federalis pada masa revolusi, tentu kita dapat melihatnya dari perkembangan negara-negara bagian di Indonesia saat itu sebagaimana yang terjadi di Jawa bagian barat (Sewaka, 1952, hlm.

6). Mengingat keberhasilan Belanda dalam membentuk 15 negara bagian tidak serta merta mengantarkan mereka pada kekuasaan yang abadi, karena orang-orang Indonesia yang mendukung sistem politik federal (selanjutnya disebut federalis) di 15 negara bagian tersebut hanya minoritas saja jika dibandingkan dengan Republikan (Sjamsuddin, 1992, hlm. 24).

Negara Pasundan sebagai konsep negara federal pada dasarnya dapat dikategorikan menjadi dua negara yang berbeda. Pertama, ialah Negara Pasundan yang diusung oleh Surya Kertalegawa dan kedua ialah Negara Pasundan yang terbentuk melalui konferensi-konferensi Jawa Barat. Pada tanggal 18 November 1946 terdapat seorang bangsawan di Jawa Barat yang mendirikan sebuah partai PRP (Partai Rakyat Pasundan), bangsawan tersebut adalah Surya Kertalegawa. Yang dalam penjelasan pertama adalah sebagai pengusung Negara Pasundan bagian I. Surya Kertalegawa merupakan mantan Bupati Garut periode 1929-1944. Ia dengan PRP berusaha melakukan berbagai kampanye politik di Jawa Barat dalam rangka mengimplementasikan tujuan dari PRP yaitu pembentukan Negara Pasundan. Pada tahun 1947, kemudian menyatakan diri sebagai Presiden Negara Pasundan. Namun, tindakannya tersebut mendapatkan reaksi keras dari berbagai pihak terutama yang pro terhadap konsep negara Republik (kemudian disebut Republikan). Belanda yang merasa Surya Kertalegawa kurang populer untuk menarik masa di Jawa Barat, kemudian memutuskan dukungannya terhadap Negara Pasundan bentukan Surya.

Dalam konferensi Jawa Barat I (13 sampai 18 Oktober 1947) terdapat 20 orang pembicara dengan berbagai pandangan yang ada. Menurut Sjamsuddin, et al (1992, hlm. 76) pembicara dalam konferensi Jawa Barat tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok berdasarkan pandangan umum yang diberikan di dalam forum. Kelompok pertama, ialah kelompok yang setuju dengan pembentukan Negara Pasundan karena merasa sebagai orang Sunda dan berpihak untuk

memerintah etnisnya sendiri. Kelompok kedua, ialah orang Sunda yang menolak terhadap pembentukan negara federal dan merasa bahwa Jawa Barat adalah bagian dari Republik Indonesia (Syafudin, et al, 1993, hlm 77). Dan kelompok ketiga ialah kelompok yang bersikap ambivalen, yaitu setuju dengan catatan hanya berupa pemerintahan sementara, mengusulkan pemerintahan bercorak Islam, dan mengusulkan pembentukan daerah istimewa. Berdasarkan kondisi yang terjadi saat itu, jelas terdapat dikotomi antara kaum Republikan dan Federalis dalam pembentukan Negara Pasundan yang diprakarsai oleh Belanda.

Pada pelaksanaan konferensi-konferensi Jawa Barat yang selanjutnya, usaha untuk membentuk Negara Pasundan menjadi sangat kuat karena banyaknya keterlibatan kaum federalis yang menyatakan mosi dan resolusi setuju akan pembentukan negara federal di Jawa Barat. Di lain pihak, keberadaan kaum *Republiken* belum padam, hal ini dibuktikan dengan munculnya tokoh-tokoh yang melakukan penolakan terhadap konsep negara federal Jawa Barat (Lubis, 2005, hlm 66). Misalnya Male Wiranatakusumah (putra Wiranatakusumah V) yang mencoba mengangkat isu demokrasi ke permukaan dengan anggapan bahwa konferensi Jawa Barat itu tidak berdasar pada konsep demokrasi yang benar. Keberadaan suatu konferensi tidaklah cukup untuk menentukan status Jawa Barat. Selain itu, muncul kaum intelektual Jawa Barat yang mengeluarkan manifest pada 20 Desember 1947 dengan tujuan menentang pembentukan negara federal di Jawa Barat (Mulyana, 1996, hlm 45). Manifest ini ditandatangani oleh 20 orang pemuka dan intelektual yang kemudian dikenal dengan "Manifest 20", yang diantaranya terdiri dari Prof. Dr. Djuhana Wiradikarta dan Dr. R. Tumenggung Djumhana Wiriatmadja.

Ambisi kaum Republikan untuk menegakkan negara kesatuan bukanlah hal yang mudah karena saat itu Indonesia secara resmi adalah negara federal yang lengkap dengan perangkat kenegaraannya. Di sisi

lain, keberadaan Belanda di Indonesia juga menjadi suatu hambatan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Menegakkan konsep negara kesatuan secara terang-terangan sama saja dengan memicu konflik bersenjata kembali dengan Belanda yang dianggap sebagai kaum Federalis. Walaupun demikian, pergerakan politik kaum Republikan terbilang cerdas, mengingat keanggotaan dalam batang tubuh pemerintahan RIS didominasi oleh Republikan. Sebut saja Soekarno sebagai Presiden RIS dan Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri, mereka berdua merupakan Republikan yang mendukung gerakan negara kesatuan. Sedangkan keberadaan Federalis dalam pemerintahan RIS cenderung sedikit. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan tabel berupa komposisi kaum Republikan dan Federalis di dalam pemerintahan RIS (Kahin, 2013, hlm. 628):

Jabatan	Nama	Keanggotaan	Republikan /Federalis
Perdana Menteri	Mohammad Hatta	Non-partai	Republikan
Luar Negeri	Mohammad Hatta	Non-partai	Republikan
Dalam Negeri	Anak Agung Gde Agung	Non-partai	Federalis
Pertahanan	Sultan Hamengkubuwono IX	Non-partai	Republikan
Keuangan	Sjafruddin Prawiranegara	Masyumi	Republikan
Perekonomian	Djuanda	Non-partai	Republikan
Pendidikan	Abu Hanifah	Masyumi	Republikan
Perburuhan	Wilopo	PNI	Republikan
Kehakiman	Supomo	Non-partai	Republikan
Transportasi dan Irigasi	H. Laoh	PNI	Republikan
Sosial	Kosasih	-	Federalis
Agama	Wachid Hasjim	Masyumi	Republikan
Kesehatan	Johannes Leimena	-	Republikan
Penerangan	Arnold Mononutu	-	Federalis
Tanpa Portofolio	Mohammad Roem	Masyumi	Republikan
Tanpa Portofolio	Sultan Hamid II	-	Federalis
Tanpa Portofolio	Suparmo	-	Federalis

Sumber: Kahin, G. McT. (2013). Nasionalisme & Revolusi Indonesia. Jakarta: Komunitas Bambu, hlm. 628

Negara bagian yang memelopori pembubaran pemerintahannya adalah Negara Pasundan, dan yang menjabat sebagai Wali Negeranya adalah Wiranatakusumah V.

Tindakan tersebut sebenarnya telah dilakukan sebelum terbentuknya pemerintahan RIS. Munculnya gerakan anti negara federal yang dipelopori oleh kaum Republikan di dalam pemerintahan Negara Pasundan muncul akibat ketidakmampuan Negara Pasundan untuk menjamin keamanan dan ketentraman rakyatnya. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya resolusi dari berbagai elemen masyarakat yang ingin menggabungkan wilayahnya dengan RI. Kondisi yang demikian kemudian mendorong daerah-daerah di Negara Pasundan untuk melepaskan diri dan bergabung dengan RI. Sebut saja Tasikmalaya yang memutuskan dengan pemerintah Pasundan untuk kemudian bergabung dengan RI. Keputusan yang diambil oleh Kepala Desa Tasikmalaya tersebut didukung penuh oleh sebelas anggota Dewan Perwakilan Kabupaten Tasikmalaya (Kahin, 2013, hlm 104). Hal ini menjadi titik balik runtuhnya eksistensi kaum federalis dan hancurnya hegemoni yang dibuat kembali oleh Belanda di Indonesia.

### Dinamika Negara Pasundan

Masa Revolusi adalah masa dimana terdapat dua kepentingan besar, yaitu antara pihak Republik Indonesia dan pihak Belanda. Terjadi proses saling tarik – menarik diantara keduanya. Pihak Belanda terus menerus bergerak untuk melemahkan posisi Republik Indonesia dengan cara membentuk negara-negara federal di wilayah yang berhasil dikuasainya. Negara Jawa Barat yang kemudian dikenal dengan Negara Pasundan merupakan salah satu produk politik federal Belanda yang didirikan pada bulan 1948 (Ricklefs, 2005, hlm. 455). Terdapat dua periode Negara Pasundan, yang pertama ialah Negara Pasundan yang didirikan oleh Partai Rakyat Pasundan yang dipimpin oleh Suria Kertalegawa pada tahun 1947 dan kedua adalah Negara Pasundan bentukan Belanda yang lahir pada April 1948 (Sjamsuddin, dkk, 1992). Dalam perkembangannya, keberadaan negara federal Jawa Barat ini terbilang berusia pendek karena

harus dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang terus berkecamuk, baik itu dalam internal pemerintahan maupun hubungannya dengan pihak Republik Indonesia. Dalam pandangan Kahin (2013, hlm. 340-341) gerakan politik federal yang dilakukan oleh Belanda di Jawa Barat, tak lain merupakan semacam balon percobaan yang ditujukan untuk menjauhkan orang Sunda yang berada di Jawa Barat dari Republik Indonesia.

Sebelum diproklamasikannya Negara Pasundan oleh Suria Kertalegawa, Belanda terlebih dahulu menggencarkan propaganda yang mengarah pada sentimen rasis antara Jawa dan Sunda. Mengingat pucuk pimpinan Jawa Barat saat itu dipegang oleh orang non-Sunda (Sutarjo Kartohadikusumo). Gubernur Jawa Barat tersebut merupakan seorang keturunan Jawa, kondisi yang demikian kemudian menimbulkan penolakan dari tokoh Sunda yaitu Suria Kertalegawa. Menurutnya golongan Menak Sunda lebih berhak untuk menduduki posisi sebagai gubernur Jawa Barat (Mulyana, 2015, hlm. 70-71). Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Suria Kertalegawa sendiri merupakan birokrat kepercayaan Beladan pada masanya. Ia merasa mendapatkan dukungannya kembali ketika Belanda melancarkan propaganda sentimen ras demikian. Oleh karena itu, ia berani menentang dengan alibi sentralisasinya yang berujung pada pembentukan Partai Rakyat Pasundan.

Belanda sebenarnya sudah melakukan sejumlah gerakan yang sudah diperhitungkan untuk mendirikan suatu rezim non-Republik di wilayah yang dikuasainya jauh sebelum dilaksanakannya Perundingan Renville. Usaha pertamanya adalah dengan mengadakan, "Gerakan Pasundan" yang dimulai pada permulaan Maret 1947, menurut Wolf (dalam Kahin, 2013) gerakan tersebut merupakan "suatu rencana sesat yang diatur oleh satuan pasukan Belanda dan pemerintah sipil yang terlalu fanatik". Orang Indonesia yang menjadi presiden dari gerakan ini adalah Suria Kertalegawa. Beberapa sejarawan

kemudian menyebut pembentukan negara federal Jawa Barat ini sebagai Negara Pasundan jilid I. Namun, dalam lain kesempatan Suria Kertalegawa mengatakan kepada Kahin yang saat itu menjadi jurnalis bahwa gagasan tentang Gerakan Pasundan sebenarnya datang dari Kolonel Santoso yang tak lain adalah penasihat politik van Mook. Terwujudnya gagasan tersebut juga tidak terlepas dari bantuan yang diberikan oleh NEFIS (Intelijen Militer Belanda). Suria Kertalegawa mengatakan bahwa ia sendiri sebelumnya tidak mengetahui akan gerakan yang dilakukan selama dua hari tersebut (Kahin, 2013, hlm. 340).

Negara Pasundan dari Suria Kertalegawa pada perkembangan mengalami berbagai permasalahan sebagai akibat dari berbedanya jalan pemikiran Kertalegawa dengan masyarakat Sunda. Pemerintah Republik menganggap Proklamasi Negara Pasundan dan aksi-aksi yang dilakukan oleh PRP (Partai Rakyat Pasundan) merupakan suatu pelanggaran terhadap Perjanjian Linggarjati. Masyarakat Jawa Barat juga menyoroti berbagai pergerakan yang dilakukan oleh PRP dan Suria Kertalegawa. Mereka menganggap bahwa Suria Kertalegawa telah melakukan aksi separatis, anggapan yang sama juga muncul dari keluarganya. Parahnya, di daerah-daerah Republik di Jawa Barat diselenggarakan rapat untuk menentang Negara Pasundan dan menjanjikan sebuah imbalan sebesar sepuluh ribu rupiah bagi siapa saja yang dapat menangkap hidup atau mati Suria Kertalegawa (Sjamsuddin, 1992, hlm. 32). Kondisi tersebut menggambarkan dengan jelas kepada kita betapa peliknya nasib negara federal Jawa Barat dalam menghadapi penentangan-penentangan dari masyarakatnya.

Belanda yang menyadari akan lemahnya dukungan terhadap Negara Pasundan bantukan Suria Kertalegawa, kemudian menghentikan dukungannya dan memiliki untuk menemukan cara lain untuk membentuk negara federal baru di Jawa Barat. Dengan demikian, Negara Pasundan yang dipimpin oleh Suria Kertalegawa perlahan redup dan menghilang

dengan sendirinya. Belanda kemudian membentuk suatu negara federal baru dengan berdasar pada konferensi Jawa Barat yang diselenggarakan sebanyak tiga kali. Dari konferensi tersebut kemudian lahirlah Negara Federal Jawa Barat yang kemudian dinamakan dengan Negara Pasundan, sama dengan apa yang dibentuk oleh Suria Kertalegawa pada tahun sebelumnya. Presiden dari Negara Pasundan sebelumnya (Kertalegawa) menentang akan pembentukan negara federal baru ini. Namun, sikapnya perlahan berubah ketika ia duduk di parlemen mewakili PRP. Menurut Kertalegawa, dengan masuknya ia ke dalam jajaran parlemen maka semangat Negara Pasundan lama pun ikut menjelma dalam Negara Pasundan baru. Hal ini dapat menjadi celah politik bagi kaum Republikan, mengingat Wiranatakusumah V merupakan tokoh sunda lain yang begitu dicintai rakyat berada di pihak Republikan.

Terbentuknya Negara Pasundan Jilid II yang diinisiasi oleh Belanda dalam perkembangannya mencerminkan bagaimana proses tarik menarik antara Republik Indonesia dengan Belanda. Dalam internal pemerintahan Pasundan pun terdapat berbagai intrik dari kaum Republikan yang duduk di kursi parlemen dalam rangka menghambat kepentingan federalis Belanda. Negara Pasundan dari Belanda ini dipimpin oleh seorang wali negara yang berasal dari kaum menak Sunda tersohor, yaitu R. A. A. Wiranatakusumah. Pembentukan Negara Pasundan Jilid II ini juga mengundang reaksi keras dari berbagai pihak, terutama dari pihak Republik yang secara tegas mengeluarkan maklumat pada 15 Februari 1948. Selain itu, tokoh-tokoh yang tergabung ke dalam Paguyuban Pasundan pun mengeluarkan maklumat untuk menyikapi pembentukan Negara Pasundan. Pada intinya mereka bersikeras untuk tetap mempertahankan Jawa Barat sebagai daerah otonom dari NKRI. Menurut Nasution (dalam Sjamsuddin, 1992, hlm. 48) semua konferensi yang diselenggarakan oleh Belanda dalam rangka membentuk negara federal Jawa

Barat tak lain adalah sebuah rekayasa belaka. Terutama pada pelaksanaan Konferensi Jawa Barat III yang diinisiasi oleh Pemerintah Federal Sementara di Jakarta yang dikenal dengan Pemerintah Umum.

Parlemen Sementara Pasundan diisi oleh sepuluh fraksi yang terdiri dari Fraksi Nasional, Fraksi Kesatuan, Fraksi Indonesia, Fraksi PRP, Fraksi Tengah, Fraksi IEV, Fraksi Nederlands Groep, Fraksi Katolik, Golongan Cina dan Golongan Arab. Yang tergolong ke dalam fraksi besar adalah Fraksi Nasional, Fraksi Kesatuan, dan Fraksi Indonesia. Mengingat bentuk pemerintahan yang disepakati adalah parlementer maka Negara Pasundan ini identik dengan sistem kabinet yang bertanggung jawab kepada wali negara dalam menjalankan pemerintahannya. Sistem ini sangat menguntungkan bagi kaum Republikan. Dilihat dari pemimpin yang terpilih itu R. A. A. Wiranatakusumah, menjadi celah pengontrolan sistem didalam negara federal. Meskipun nantinya, banyak juga diisi oleh para kaum *Republiken* lainnya. Kabinet pertama Negara Pasundan dipimpin oleh R. Adil Puradiredja.

Setelah Adil Puradiredja mengundurkan diri sebagai formatur kabinet masa jabatan formatur kabinet selanjutnya diserahkan kepada Jumhana. Sama seperti halnya Adil Puradiredja yang merupakan seorang Republikan. Jumhana pun merupakan seorang pro-Republik yang mempunyai ketelitian tinggi dalam menjalankan roda pemerintahan di Pasundan. Seringkali ia juga mendapatkan tekanan-tekanan dari Belanda dari program-program yang dijalankan malah menyebabkan kevakuman pemerintahan. Belanda yang merasa tidak puas akan hal tersebut kemudian melakukan tindakan intimidatif terhadap tokoh-tokoh Negara Pasundan (Sjamsuddin dkk, 1992 hlm. 65). Ancaman pertama tentunya ditujukan kepada Wiranatakusumah sebagai wali negara Pasundan yang dianggap tidak mampu membentuk kabinet. Para anggota parlemen dan kabinet merasa terintimidasi dengan hal tersebut. Mereka percaya bahwa pembangkangan yang dilakukan oleh mereka

hanya akan menimbulkan situasi yang semakin suram. Belanda menginginkan adanya suatu perombakan dalam tubuh Kabinet Jumhana, namun usul-usul tersebut selalu mendapat penolakan. Akhirnya pada 15 Januari 1949, empat orang anggota kabinet yang berada di Bandung mengadakan rapat dan mereka memutuskan untuk mundur secara perorangan dari kabinet.

Keinginan para anggota kabinet untuk mengundurkan diri pada akhirnya tidak mendapat restu dari Wiranatakusumah sebagai wali negara. Jumhana selaku formatur kabinet pun berhasil menahan anggotanya untuk tidak mundur dari kursi pemerintahan yang dianggap sedang genting tersebut. Mayor Jenderal Engels tidak menerima alasan yang disampaikan oleh Jumhana terkait alasan pengunduran diri para anggota kabinetnya. Untuk kesekian kalinya pihak elite Belanda melakukan campur tangan dalam situasi politik di Negara Pasundan. Pada akhirnya keempat anggota kabinet tersebut tetap melakukan pengunduran diri. Kabinet Jumhana pun kemudian hanya menyisakan dua menteri saja, kondisi tersebut akhirnya mendorong Jumhana untuk mengundurkan diri pada 28 Januari 1949 (Sjamsuddin, 1992, hlm. 64).

Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Negara Pasundan pada akhirnya mengantarkan negara federal yang baru lahir ini pada titik lemahnya. Muncul berbagai kritikan terhadap Negara Pasundan yang pada akhirnya berakibat pada jatuhnya Kabinet Jumhana. Wiranatakusumah yang saat itu masih menjabat sebagai wali negara kemudian menunjuk formatur kabinet baru yaitu M. Sewaka. Namun penunjukan tersebut dibatalkan sesaat setelah wali negara mendengarkan pernyataan Sewaka yang ingin menjalankan program yang mengarah pada pembubaran Negara Pasundan jika ia menjadi perdana menteri baru (Sjamsuddin, dkk. 1992 hlm 66). Usul tersebut ditolak oleh Wiranatakusumah karena dianggap akan membahayakan keamanan dan kedamaian di Jawa Barat. Walaupun seseorang yang pro-Republik,

Wiranatakusumah menginginkan hal yang lebih baik dari gagasan pembubaran langsung. Formatur kabinet kemudian diberikan kepada Anwar Cokroaminoto. Mengingat kondisi Negara Pasundan saat itu selalu dihadapkan pada berbagai kekacauan akibat protes dari masyarakat, maka pihak Jakarta yang diwakili oleh Sultan Hamengkubuwono IX bersama Kolonel A.H. Nasution dan Mr. Ali Budiardjo memutuskan untuk mengadakan pembicaraan dengan pemerintah Pasundan dan Komandan Divisi Militer Belanda dalam rangka menjaga keamanan dan kedamaian di Jawa Barat. Keamanan dan keselamatan masyarakat menjadi hal utama dalam hal ini, bukan hanya semata-mata mendirikan sistem Republik kembali. Kolonel Sadikin kemudian ditunjuk sebagai gubernur militer di wilayah Pasundan.

Walaupun sudah terdapat keterlibatan dari pihak Republik dalam menjaga keamanan dan kedamaian di Negara Pasundan, namun kenyataannya kondisi Negara Pasundan malah semakin parah ketika dihadapkan pada kesulitan dan ketegangan dalam internal pemerintahan pada awal tahun 1950. Hal ini ditandai dengan adanya kritikan yang lebih keras lagi dari anggota-anggota Parlemen Pasundan sendiri, di samping hasrat dari rakyat yang menghendaki dibubarkannya Negara Pasundan dan dikembalikan kepada Negara Republik Indonesia. Pemberontakan APRA di bulan Januari 1950 juga setidaknya menjadi penyebabnya semakin lemahnya Negara Pasundan. Bahkan Wiranatakusumah sebagai Wali Negara Pasundan memutuskan untuk mengundurkan diri. Ini menjadi semiotik, pergerakan federal menuju republik semakin terlihat. Wiranatakusumah, bisa saja menjadikan semua permasalahan menjadi sebuah celah baru menuju Republik, yang disusul pengunduran dirinya sebagai wali negara. Pemerintah RIS kemudian mengangkat Sewaka sebagai Komisaris RIS untuk Negara Pasundan. Pengangkatan itu nyatanya tidak sesuai dengan tuntutan rakyat Jawa Barat yang menghendaki dibubarkannya negara federal tersebut (Poesponegoro dan

Notosusanto, 2011, hlm. 304). Sementara itu, kedudukan komisaris saat itu adalah untuk bertanggung jawab kepada Pemerintah RIS. Juga dianjurkan supaya bekerjasama dengan aparat pemerintahan Negara Pasundan yang ada dewasa itu, misalnya pembesar militer, polisi, sipil, dan lainnya yang masih menjabat (Sjamsuddin, 1992, hlm. 81).

### **Wali Negara Pasundan**

Dalam sidang Parlemen Negara yang diselenggarakan pada 4 Maret 1948 dilakukan pemilihan wali negara untuk menjadi kepala negara Pasundan. Forum pemilihan wali negara tersebut menampilkan dua calon, yaitu R. A. A. Wiranatakusumah (ketua DPA RI di Yogyakarta) dan RAA. Hilman Jayadiningrat (recomba Jawa Barat). Hasil akhir dari pemungutan suara yang dilakukan sebanyak tiga kali akhirnya menghasilkan satu nama untuk menjadi wali negara Pasundan, yaitu R. A. A. M. Wiranatakusumah (Sjamsuddin, dkk., 1992, hlm. 52). Wali negara terpilih (Wiranatakusumah) nampaknya dihadapkan pada suatu pilihan yang sulit, antara harus menerima jabatan sebagai wali negara Pasundan atau tidak menerima. Namun, atas pertimbangan dari pemerintah Republik Indonesia yang menyetujui Wiranatakusumah untuk menjadi wali negara Pasundan, maka ia pun menyatakan kesediaannya. Pertimbangan yang dimaksud adalah, *republikan* tidak bisa kuat dengan menyerang politik Negara Federal, cara memasuki sistem dirasa lebih tepat. Selain itu, kecintaannya terhadap kampung halaman membawanya untuk kembali dan memimpin rakyat Pasundan yang sangat ia cintai sejak dulu. Segera setelah menyatakan kesediaannya, Wiranatakusumah pun meletakkan jabatannya sebagai ketua DPA RI. Selain karena pertimbangan restu dari pemerintah Republik Indonesia, kesediaan dari Wiranatakusumah juga didasari oleh kepeduliannya terhadap Jawa Barat yang ia anggap sebagai bagian dari Republik Indonesia. Ia tidak ingin jika Negara Pasundan dikuasai oleh pihak pro-

Belanda (federalis), maka menurutnya lebih baik jika kaum *Republiken* yang memegang pucuk pemerintahan Negara Pasundan. Dengan kesehatannya yang sedang terganggu karena mengidap stroke, ia pun pergi menuju Jawa Barat menggunakan pesawat terbang. Pemikiran yang demikian itu nampaknya tertuang dalam pernyataannya kepada Antara, sebagai berikut:

“Sesungguhnya dalam prinsip saya tidak setuju dengan perceraian Jawa Barat dengan Republik, oleh karena semenjak permulaan saya bersifat Republik, saya bersedia menerima pengangkatan itu. Saya percaya bahwa Pemerintah Republik tidak akan memajukan keberatan-keberatan, oleh karena jika saya berada di sana, lebih besarlah ketika saya untuk bekerja bagi Nusa dan Bangsa daripada apa yang saya dapat mempertunjuk di hari-hari lampau (Sjamsuddin, dkk, 1992, hlm. 55).”

Terpilihnya Wiranatakusumah menjadi sebuah titik cerah menuju Negara Kesatuan yang memang diinginkan para tokoh *Republiken*. Bahkan jika merujuk kepada pernyataannya saat terpilih sebagai wali negara, Wiranatakusumah pun masih menggambarkan jiwa Republik di dalam dirinya. Seperti yang diketahui, Wiranatakusumah sendiri pernah beberapa kali menduduki jabatan penting dalam pemerintahan. Dimulai dari menjabat sebagai Bupati Bandung (1926-1930), anggota *Volksraad*, anggota BPUPKI dan PPKI, menteri dalam negeri Kabinet RI I, hingga ketua Dewan Pertimbangan Agung RI di Yogyakarta (Anderson, 1988, hlm. 495). Hal ini menunjukkan bahwa menak Sunda dari Garut ini memang sejatinya merupakan *Republiken* yang senantiasa mengabdikan diri pada RI.

Sebagai negara baru, Negara Pasundan mempunyai susunan kabinet yang mengikuti model kontinental Eropa Barat, yaitu parlementer. Pembentukan kabinet yang dilakukan oleh Wiranatakusumah dalam Negara Pasundan tampaknya tidak pernah menghasilkan kepuasan tersendiri bagi

Belanda. Mengingat orang-orang yang terdapat dalam kabinet mayoritas diisi oleh kaum Republikan yang selalu menyusun rencana untuk menghambat kelanggengan dari Negara Pasundan. Dikarenakan tidak menunjukkan hasil yang baik untuk kepentingannya, maka pemerintah Belanda melalui L.J.M. Beel (komisaris tinggi mahkota Belanda untuk Indonesia) memberikan surat kepada Wiranatakusumah agar segera mengganti program kabinet Jumhana yang menggantikan Adil (Sjamsuddin, dkk, 1992 hlm. 75). Dalam surat tersebut, terdapat suatu ancaman yang menyatakan bahwa jika keinginan Belanda tersebut tidak dapat direalisasikan, maka mereka akan membentuk pemerintahan militer yang kuat dan membubarkan Negara Pasundan. Tidak cukup dalam surat, ancaman dari Belanda terhadap Wiranatakusumah pun dilakukan secara langsung. Melalui Mayjen Engels dan Dr. Van Diffelen, mereka mengancam akan menangkap tokoh-tokoh yang terdapat dalam pemerintahan untuk ditangkap. Dengan kecerdasan yang dimilikinya, Wiranatakusumah menanggapi ancaman pihak Belanda tersebut dengan tegas. Ia memberikan ancaman pula terhadap pihak Belanda akan meletakkan jabatannya sebagai wali negara jika Belanda melakukan penangkapan terhadap anggota pemerintahan Pasundan. Ini menjadi bukti bahwa secara pergerakan politiknya, Wiranatakusumah tetap menjaga kaum *Republiken* yang ada didalam tubuh Negara Pasundan. Akhirnya pada tanggal 8 Maret 1950, Negara Pasundan dinyatakan bubar dan kembali menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia (Poesponegoro dan Notosusanto, 2011, hlm. 304).

## KESIMPULAN

Dinamika yang terjadi di Indonesia pasca kemerdekaan cukuplah runyam, salah satu faktornya dengan kembalinya Belanda ke Indonesia. Hingga pada akhirnya dengan berbagai perundingan yang dijalani mencoba untuk memecah belah Indonesia, salah satu caranya adalah lahirnya negara-negara

federal dan beberapa menjadi negara boneka. Salah satunya adalah keberadaan Negara Pasundan. Pada awalnya dipimpin oleh Suria Kartalegawa dengan dukungan penuh dari Van Mook (perwakilan Belanda), namun pada akhirnya tahun 1947 dalam sebuah kongres pertama Negara Pasundan, ia dikalahkan oleh Wiranatakusumah V. Bukan tanpa sebab, Wiranatakusumah V merupakan seorang republikan, hal ini direbutnya dari Suria Kartalegawa untuk mempertahankan Negara Pasundan di dalam negara Indonesia, berbeda dengan Suria Kartalegawa yang saat itu disinyalir patuh dan manut terhadap Belanda hingga pada akhirnya, golongan yang seperti Suria Kartalegawa di dalam masa revolusi Indonesia disebut golongan federalis. Begitu juga dinamika politik yang terjadi di Negara Pasundan, di mana golongan politiknya dibagi menjadi dua kubu, yakni golongan republikan dan golongan kontra revolusi. Golongan *republikan* dan *federalia* ini saling bersaing terutama di dalam ranah posisi Wali Negara di Negara Pasundan. Meskipun begitu, tetapi Wiranatakusumah V tetap mendapatkan perhatian dan atensi dari rakyat karena dirinya merupakan seorang yang elegan dan bersahaja. Selain itu, dirinya juga banyak mendapat dukungan berbagai golongan politik, hal ini dibuktikan dan terjadi bahkan hingga Negara Pasundan kembali lagi ke dalam pangkuan negara Indonesia pada tahun 1950.

## REFERENSI

- Aman. (2008). Nasionalisme dan revolusi: pengalaman indonesia. *Jurnal Mozaik*. 4 (1).
- Cheong, Y. M. (1982). *H.J. Van mook and indonesian independence: a study of his role in dutch-indonesian relation, 1945-1948*. The Hague: Martinus Nijhoff
- Ekdjati, E. S, et al. (1980). *Sejarah revolusi kemerdekaan di daerah jawa barat*. Proyek IKDK Depdikbud.
- Iskandar, M. (2001). *Para pengemban amanah: pergulatan pemikiran kiai dan ulama di jawa barat 1900-1950*. Mata Bangsa

- Ismaun. (2005). *Pengantar belajar sejarah sebagai ilmu dan wahana pendidikan*. Historia Utama Press.
- Jamil, R. N., Sumarjono, & Soepono B. (2017). Soekarno's idea about Indonesian revolution in 1945-1957. *Jurnal Historica*. 1. Hlm. 12 – 28.
- Kahin, G. McT. (2013). *Nasionalisme & revolusi Indonesia*. Komunitas Bambu.
- Klein, J.W. (1931). *Het preangelstelsel (1677-1871) en zijn nwerking*. Leiden
- Lapian, A. B. & Drooglever, P.J. (1992). *Menelusuri jalur linggarjati: diplomasi dalam perspektif sejarah*. Grafiti
- Limah, H., Utomo, C. B., & Suryadi A. (2018). Poster dan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Yogyakarta tahun 1945 - 1949. *Journal of Indonesian History*, 7(1), hlm. 35 – 44.
- Lubis, N.H. (1998). *Kehidupan kaum menak priangan 1800-1942*. Pusat Informasi Kebudayaan Sunda
- Lubis, N. H. (2005). *Biografi r. s. soeradiredja (1900-1990)*. Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran.
- Mulyana, A. (1996). Negara pasundan 1947-1950: gejala menak sunda menuju integrasi nasional. *Tesis*. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia
- Mulyana, A. (2015). *Negara pasundan 1947-1950: gejala menak sunda menuju integrasi nasional*. Ombak
- Poesponegoro, M.D., & Notosusanto, N. (2011). *Sejarah nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka
- Purwanto, B. (2001). Memahami Kembali Nasionalisme Indonesia. *Jurnal Ilmu Soisal dan Politik*. 4(3), hlm. 243- 264.
- Reid, A. (1996). *Revolusi nasional Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan
- Rivai, M. (1984). *Ungkapan sejarah perjuangan rakyat Jawa Barat*. PT Intermedia
- Rosidi, A. (2009). *Manusia Sunda: sebuah esai tentang tokoh-tokoh sastra dan sejarah*. PT Inti Dayu Press
- Sewaka. (1952). *Tjorat-tjoret dari djaman ke djama.*, tanpa nama penerbit
- Sjamsuddin, H., et al. (1992). *Menuju negara kesatuan: negara pasundan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Sjamsuddin, H. (2012). *Metodologi sejarah*. Penerbit Ombak.
- Soedjatmoko. (1991). "Pilihan dan peluang revolusi Indonesia setelah 45 tahun: beberapa refleksi pribadi" dalam *Sejarah Jakarta*. PT Gramedia dan MSI Pusat
- Sofiani, Y. (2018). Perubahan kedudukan dan kekuasaan bupati di Priangan pada tahun 1800-1916. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sejarah* 1(1).
- Suwirta, A. (2015). *Revolusi Indonesia: dalam news and views (sebuah antologi sejarah)*. Ombak
- Syafrudin, A. et al. (1993). *Sejarah pemerintahan di Jawa Barat*. Pemda TK I Jawa Barat
- Wiradireja, M. Y. (2012). Peranan R. A. A. Wiranatakusumah V dalam penyebaran tembang Cianjuran.
- Zuhdi, S. (2014). *Nasionalisme, laut, dan sejarah*. Komunitas Bambu